

# I. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Beberapa tahun terakhir ini tatanan dunia mengalami perubahan cepat yang mempengaruhi kegiatan ekonomi nasional hingga regional. Dalam mengatasi tantangan akibat dari cepatnya perubahan yang terjadi tersebut dibutuhkan perencanaan yang tepat dalam proses pembangunan ekonomi. Salah satu hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam pembangunan ekonomi adalah mengetahui potensi terkait dengan keunggulan dibidang ekonomi pada daerah yang bersangkutan, supaya tujuan pembangunan ekonomi pun akan tercapai. Tujuan dari pembangunan ekonomi sendiri adalah untuk meningkatkan taraf hidup bermasyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan pendapatan, dan mengatasi kemiskinan. Di Indonesia sendiri era otonomi daerah telah memberikan kesempatan pada pemerintah daerah baik provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh daerahnya. Yang mana pemerintah di daerah mempunyai wewenang untuk dapat mengelola keuangan sekaligus menentukan arah pembangunan yang akan dilaksanakan.

Setiap negara pasti mengalami perkembangan seiring berjalannya zaman, tidak terkecuali pada Negara Indonesia yang menduduki negara berkembang. Hal tersebut ditandai dengan adanya pembangunan yang terus dilakukan. Pembangunan merupakan rangkaian usaha perubahan yang terencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu pemerintah, bangsa, dan negara guna menuju modernitas dalam rangka memajukan bangsa. Pembangunan dapat pula diartikan sebagai proses yang melibatkan perubahan besar ataupun kecil dalam struktur sosial, kelembagaan

nasional, serta masyarakat, seperti percepatan pertumbuhan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pembangunan digunakan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera baik dari segi materil maupun spiritual.

Transformasi struktural perekonomian adalah salah satu syarat dari adanya pertumbuhan ekonomi yang mendukung keberlanjutan pembangunan. Dalam hal perubahan struktur perekonomian daerah para pemerintah Kabupaten atau Kota harus dapat menganalisa dengan baik pergeseran sektor yang terjadi di daerahnya. Kemunculan sektor-sektor baru merupakan hal yang baik bagi perekonomian daerah kedepannya, dan apabila dapat dioptimalkan maka sektor-sektor baru tersebut dapat menopang perekonomian daerah yang bersangkutan. Sehingga kemunculan sektor-sektor baru ini tidak menimbulkan dampak negatif dan pada akhirnya dapat meningkatkan nilai produksi daerah (Sutono *et al.*, 2020). Perkembangan dalam sektor-sektor baru pada perekonomian daerah akan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut, dimana pertumbuhan ekonomi dapat mengetahui sukses atau tidaknya proses pembangunan di suatu daerah. Hal tersebut dikarenakan di dalam pembangunan ekonomi terdapat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sendiri adalah sebuah proses kegiatan perekonomian yang mengakibatkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah sehingga akan meningkatkan kemakmuran masyarakat.

Pembangunan daerah adalah proses pemerintah daerah serta masyarakatnya untuk mengelola sumber daya yang tersedia serta membentuk pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta. Pembangunan daerah tersebut ditujukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan menumbuhkan atau meningkatkan

perkembangan ekonomi dalam wilayah tersebut (Pancawati dan Widaswara, 2023). Pembangunan daerah di Indonesia masih banyak yang mengalami hambatan, hal tersebut dikarenakan sistem pembangunan ekonomi masih bersifat pusat. Dalam mengatasi hambatan tersebut pemerintah dapat menetapkan otonomi daerah yang merupakan upaya pembangunan daerah. Pemerintah dapat mengambil keputusan daerah berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan potensi daerah tersebut. Tujuannya adalah untuk menjadikan pemerintah lebih dekat dengan masyarakatnya sehingga pelayanan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien.

Pembangunan daerah sebagai hal penting dari pembangunan nasional yang merupakan proses perubahan yang terencana dalam upaya mencapai sasaran. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah itu sendiri dan melibatkan seluruh kegiatan yang ada melalui dukungan masyarakat di berbagai sektor (Lambuaso *et al.*, 2020). Hal tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang menuntut pemerintah daerah untuk melaksanakan desentralisasi dan memacu pertumbuhan ekonomi. Peraturan tersebut mempunyai makna yang sangat penting bagi daerah karena terdapat pelimpahan wewenang dan pembiayaan yang selama ini menjadi tanggung jawab pusat. Sehingga bagi pemerintah daerah sangat besar pengaruhnya untuk mengolah daerah tersebut melalui wewenang yang dilimpahkan. Pertumbuhan ekonomi dalam setiap daerah dipengaruhi oleh keunggulan komparatif suatu daerah, spesialisasi wilayah, dan potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah tersebut.

Salah satu indikator dalam menunjukkan tingkat kemakmuran suatu daerah adalah menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Yang Berlaku ataupun Atas Dasar Harga Konstan. Suatu daerah yang mengalami pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakatnya dapat dilihat dari pendapatan perkapita. Yang mana semakin tinggi pendapatan perkapita maka makin tinggi pula perekonomiannya. Sektor-sektor ekonomi yang masuk dalam komponen PDRB adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik, gas, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, limbah dan daur ulang, konstruksi, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, sektor transportasi dan pergudangan, sektor penyediaan makan dan minum, sektor informasi dan komunikasi, sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor real estate, sektor jasa perusahaan, sektor administrasi, pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, sektor jasa pendidikan, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, sektor jasa lainnya. PDRB adalah indikator penting yang menjadi tolak ukur keberhasilan perekonomian suatu daerah dan berguna untuk menentukan arah pembangunan di masa depan (Ola dan Manduapessy, 2022).

Negara Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang mengandalkan sektor pertanian dalam menopang pembangunan juga sebagai sumber mata pencaharian masyarakatnya. Sektor pertanian berperan sebagai penyedia pangan bagi sebagian besar penduduk di negara berkembang termasuk Negara Indonesia. Selain itu, sektor pertanian berguna sebagai penyedia lapangan kerja yang luas bagi hampir seluruh angkatan kerja. Sektor pertanian juga sebagai penyedia bahan baku bagi sektor industri yang kini sedang berkembang pesat yang berkontribusi besar

terhadap pertumbuhan PDRB. Yang artinya sektor pertanian adalah sektor yang sangat dominan peranannya bagi perekonomian Indonesia, sehingga pembangunan sektor pertanian harus terus dilakukan.

Pembangunan pertanian bertujuan untuk meningkatkan hasil dan mutu produksi, meningkatkan taraf hidup dan pendapatan petani, peternak dan nelayan, memperluas lapangan pekerjaan, menunjang pembangunan industri, serta memperluas pasar. Pembangunan pertanian berguna untuk mengembangkan potensi yang ada yaitu memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia secara optimal. Sektor pertanian diharapkan mampu memberikan sumbangan yang berarti dalam peningkatan pendapatan nasional, dimana berperan sebagai sumber penghasil bahan pangan, mata pencaharian sebagian besar penduduk, sumber bahan baku bagi industri, penghasil devisa dari ekspor komoditinya, serta berpengaruh besar terhadap stabilitas dan keamanan nasional. Sehingga pembangunan pada daerah yang mempunyai potensi di bidang pertanian perlu dilakukan pemerintah guna meningkatkan kinerja sektor pertanian secara optimal.

Tabel 1.1 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Mojokerto

No.	Sektor Perekonomian	PDRB ADH Konstan (Juta Rupiah)
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.978.807,5
2.	Pertambangan dan Penggalian	527.888,2
3.	Industri Pengolahan	36.102.773,33
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	43.461,17
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	44.891,31
6.	Konstruksi	5.084.015,74

Lanjutan Tabel 1.1

No.	Sektor Perekonomian	PDRB ADH Konstan (Juta Rupiah)
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.535.694,26
8.	Transportasi dan Pergudangan	841.776,14
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.155.070,05
10.	Informasi dan Komunikasi	4.629.177,55
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	856.142,86
12.	Real Estate	958.382,40
13.	Jasa Perusahaan	90.959,45
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.246.021,74
15.	Jasa Pendidikan	775.420,76
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	272.018,00
17.	Jasa lainnya	557.339,90
TOTAL		63.699.840,43

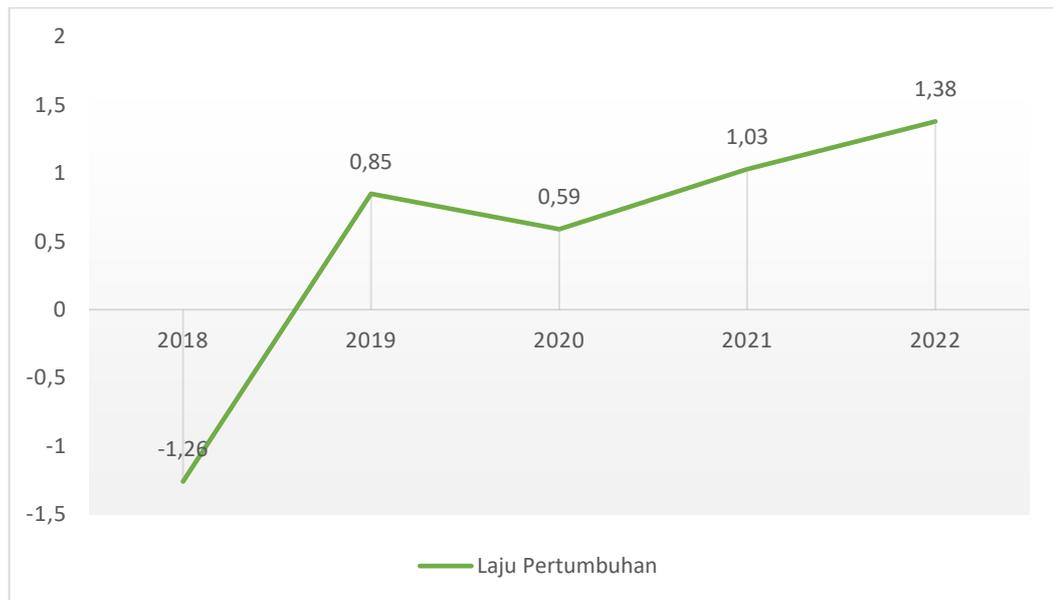
Sumber : BPS Kabupaten Mojokerto, (2022)

Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang mempunyai potensi dalam mengembangkan bidang pertanian. Pada tabel 1.1 sektor pertanian, kehutanan dan perikanan memiliki nilai PDRB sebanyak 3.978.807,5 juta rupiah pada tahun 2022. Sektor tersebut menjadi urutan 5 sebagai sektor penyumbang PDRB tertinggi di Kabupaten Mojokerto. Sehingga hal tersebut menjadi hal yang wajar apabila pemerintah Kabupaten Mojokerto menggerakkan sektor pertaniannya untuk meningkatkan perekonomian regional.



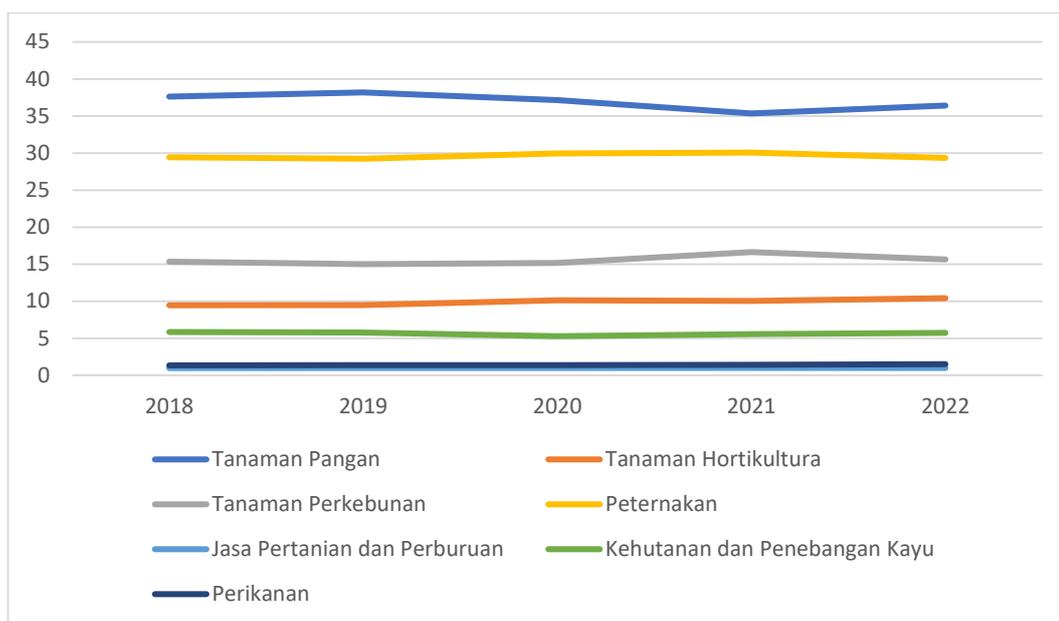
Gambar 1.1 Pertumbuhan Tenaga Kerja Sektor Pertanian

Sektor pertanian dapat menyerap tenaga kerja terbesar ketiga yaitu sebanyak 24,11% yang mana meningkat sebesar 7,36% dari tahun 2021. Hal itu diketahui dari gambar 1.2 yang menggambarkan jumlah tenaga kerja pada tahun 2021 sebanyak 100.139 tenaga kerja dan meningkat sebanyak 148.403 pada tahun 2022. Sektor pertanian merupakan sektor yang paling kuat diterjang badai covid pada awal pandemi. Sektor pertanian ini menyerap tenaga kerja terbesar ketiga dibandingkan dengan sektor lainnya. Akan tetapi kontribusi terhadap PDRBnya kecil sekali yaitu hanya sebesar 7%. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk dapat memaksimalkan sektor pertanian yang menyerap tenaga kerja banyak dan dapat menghasilkan nilai tambah terhadap PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto.



Gambar 1.2 Kontribusi Sektor Pertanian Kabupaten Mojokerto

Kontribusi sektor ekonomi pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan berfluktuasi atau naik turun selama 5 (lima) tahun terakhir. Perubahan tersebut terjadi karena fluktuasi output yang dihasilkan oleh pertanian, peternakan, perburuan, dan jasa pertanian. Terutama dampak dari produksi yang tidak stabil pada tanaman pangan, tanaman hortikultura tahunan, tanaman perkebunan semusim, dan peternakan. Pada tahun 2018 pertumbuhan sektor tersebut mencapai -1,26 persen, berfluktuasi hingga pertumbuhannya sebesar 1,38 persen pada tahun 2022. Selain itu, pada tahun 2019 sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan adalah sektor yang mengalami laju pertumbuhan terendah.



Gambar 1.3 Kontribusi Sub Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Naik turunnya kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan disebabkan oleh kontribusi dari sub kategori atau sub sektor itu sendiri. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mempunyai 7 sub sektor yang meliputi tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, jasa pertanian dan perburuan, kehutanan dan penebangan kayu, serta perikanan. Sub sektor yang berkontribusi paling tinggi dalam sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan adalah tanaman pangan. Tanaman pangan menyumbang rata-rata sebesar 37% pertahunnya, sedangkan urutan kedua adalah peternakan yang rata-rata per tahun menyumbang sebesar 29%. Naik turunnya kontribusi sub sektor tersebut menjadikan kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dalam PDRB Kabupaten Mojokerto menjadi naik turun juga.

Sub sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tersebut mempunyai potensi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kontribusi sektor pertanian di Kabupaten Mojokerto. Hanya saja pemerintah dan masyarakat belum mengolah

potensi tersebut secara optimal. Pemerintah dan masyarakat harus membuat rencana yang matang dan mengatasi segala permasalahan yang terjadi untuk terus meningkatkan kontribusi sub sektor pertanian tersebut, agar bidang pertanian yang terdapat di Kabupaten Mojokerto dapat tampak dan dapat meningkatkan nilai PDRB daerah. Salah satu cara untuk meningkatkan kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan adalah melalui penerapan strategi perencanaan pembangunan di sektor pertumbuhan terutama pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan potensial. Oleh karena itu, informasi mengenai sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan potensial yang dimiliki Kabupaten Mojokerto menjadi hal yang penting. Terutama untuk mengetahui bagian dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang paling menguntungkan dan memiliki pertumbuhan yang relatif cepat, berpeluang menciptakan banyak lapangan kerja, serta meningkatkan nilai PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di Kabupaten Mojokerto sendiri. Analisis sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan potensial juga berguna untuk memastikan realisasi perencanaan pembangunan dilakukan secara terstruktur dan sesuai potensi regional.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Mengidentifikasi apa saja sub sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan basis dan non basis di Kabupaten Mojokerto?
2. Bagaimana dinamika pergerakan sub sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dalam kurun waktu 9 tahun terakhir (2013-2022) di Kabupaten Mojokerto?
3. Bagaimana struktur pola pertumbuhan sub sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di wilayah Kabupaten Mojokerto?

4. Bagaimana pola pergeseran yang terjadi pada sub sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dalam kurun waktu 9 tahun terakhir (2013-2022) di Kabupaten Mojokerto?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Mengidentifikasi sub sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan basis dan non basis di Kabupaten Mojokerto.
2. Mengetahui dinamika pergerakan sub sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dalam kurun waktu 9 tahun terakhir (2013-2022) di Kabupaten Mojokerto.
3. Mengetahui struktur pola pertumbuhan sub sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di wilayah Kabupaten Mojokerto.
4. Mengetahui pola pergeseran yang terjadi pada sub sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dalam kurun waktu 9 tahun terakhir (2013-2022) di Kabupaten Mojokerto.

### **4.1 Manfaat Penelitian**

1. Bagi pemerintah wilayah Kabupaten Mojokerto  
Penelitian dapat digunakan sebagai salah satu referensi untuk upaya pengembangan pertumbuhan ekonomi daerah untuk memajukan sub sektor basis dalam rangka meningkatkan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dalam PDRB (Produk Domestik Regional Bruto).
2. Bagi peneliti lain  
Penelitian dapat memberikan ilmu pengetahuan khususnya di bidang pembangunan daerah dan untuk referensi penelitian selanjutnya yang membahas tentang potensi sub sektor daerah.